

HAK-HAK PEREMPUAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Widyadhana Besariani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Email: widyadhanabesariani@upnvj.ac.id

Abdul Halim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: abdul.halim@uinjkt.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta melakukan wawancara kepada pelaku pembuat perjanjian perkawinan. Di samping itu studi ini melakukan analisis terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan yang dipraktikkan di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. Studi ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat melindungi hak-hak perempuan terutama dalam kepemilikan harta dalam perkawinan untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami karena adanya percampuran harta. Pada praktiknya pemisahan harta dalam perkawinan diakomodir hakim pengadilan agama sebagai bentuk preventif terhadap perlindungan hak-hak perempuan khususnya warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran bila terjadi perceraian. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan putusan pengadilan agama, telah sejalan dalam merespon kebolehan dibuatnya perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta setelah perkawinan.

Kata Kunci: Pemisahan Harta; Perkawinan Campuran; Hak Perempuan; Perjanjian Perkawinan

Abstract

This study aims to analyze the practice of marriage agreements and the protection of women's rights during marriage after the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015. This study uses a normative juridical research with a statutory approach and a case approach and conducts interviews with the perpetrators of marriage agreement makers. In addition, this study analyzes the practice of the separation of assets on the marriage agreement practiced at the Tigaraksa Religious Court Number: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. This study shows that a marriage agreement can protect women's rights, especially in the ownership of assets in marriage, to prevent arbitrary acts on the part of the husband due to the mixing of assets. In practice, the separation of assets in marriage is accommodated by religious court judges as a preventive form of protecting the rights of women, especially Indonesian citizens in mixed marriages in the event of a divorce. The Constitutional Court's decision in Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the decision of the religious court have been in line in responding to the permissibility of making a marriage agreement related to the separation of assets after marriage.

Keywords: Separation of Assets; Mixed Marriage; Women's Rights; Marriage Agreement